
**PERANAN KEPALA KAMPUNG DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN
DI KAMPUNG WANGGAR MAKMUR DISTRIK WANGGAR
KABUPATEN NABIRE**

Yonatan Kambu

(Email : yonathankambu79@gmail.com)

Christina Martha Lewerissa

(Email : lewerissac@gmail.com)

Letarius Tunjanan

(Email : letariustunjanan@gmail.com)

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Satya Wiyata Mandala

ABSTRAK

Tujuan dari Pembangunan nasional adalah meningkatkan pembangunan diseluruh Negara Kesatuan Republik dimana pemerataan dari Sabang hingga Merauke dari Kota maupun Desa atau Kampung

Untuk mewujudkan hal tersebut tentunya Pemerintah baik Pusat harus benar – benar memperhatikan dan melihat secara dekat kondisi dari daerah yang berada di Kampung atau desa karena terkadang daerah Kampung kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat.

Tujuan yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauhmana peranan kepala kampung dalam meningkatkan pembangunan di Kampung Wanggar Makmur Distrik Wanggar Kabupaten Nabire
2. Untuk mengetahui kendala – kendala apa yang dihadapi kepala kampung dalam meningkatkan pembangunan di Kampung Wanggar Makmur Distrik Wanggar Kabupaten Nabire
3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dapat diberikan Kepala Kampung dalam meningkatkan pembangunan di Kampung Wanggar Makmur Distrik Wanggar Kabupaten Nabire

Keyword : *Kepala Kampung dan Pembangunan*

PENGANTAR

Dalam Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menunjukkan bahwa Kampung atau desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Selain itu untuk mendukung pembangunan di desa maka pemerintah memberikan otonomi kepada seluruh daerah di Republik Indonesia untuk dapat mengatur pemerintahannya di masing – masing daerah melalui Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada pasal 1 ayat 6 dan 7 berbunyi Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

Oleh karena itu, untuk mendukung upaya pemerintah dalam pemerataan pembangunan maka diperlukan peran serta seluruh pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat, namun agar dapat berjalan program – program pemerintah dalam pembangunan maka diperlukan peran dari seorang pemimpin yang mampu memimpin di daerahnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Kepala Kampung yang merupakan pimpinan terendah yang dipercayakan oleh masyarakat untuk memimpin daerahnya, oleh karena itu sebagai pemimpin harus mampu menunjukkan kemampuannya sesuai dengan kebijakan – kebijakannya terutama dalam peningkatan pembangunan, hal ini yang dilakukan oleh Kepala Kampung Wanggar Makmur Distrik Wanggar Kabupaten Nabire, yang mana Kepala Kampung Wanggar Makmur dalam peningkatan pembangunan di Kampungnya harus mampu bekerja dengan jiwa membangun Kampung

Namun terkadang dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin di Kampung terkadang kala banyak hal yang harus diprioritaskan dalam menunjang pembangunan sehingga Kepala Kampung harus mampu mengambil kebijakan dan keputusan untuk mengutamakan mana yang perlu untuk pelaksanaan pembangunan selain itu juga agar dapat berjalan dengan baik pembanunan di Kampung diperlukan dukungan dan partisipasi masyarakat dalam kebersamaannya dalam menunjang program kerja pemerintah kampung

Dari latar belakang diatas dan situasi kondisi yang penulis temukan di lokasi penelitian yaitu :

1. Kurangnya Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan di kampung
2. Program kerja yang dimiliki pemerintah Kampung belum maksimal diterapkan

3. Kurangnya transparansi dari pihak pemerintah Kampung dalam penggunaan dana untuk kegiatan pembangunan

Melihat latar belakang yang diuraikan pada latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Sejauhmana peranan kepala kampung dalam meningkatkan pembangunan di Kampung Wanggar Makmur Distrik Wanggar Kabupaten Nabire ?
2. Kendala – kendala apa yang dihadapi kepala kampung dalam meningkatkan pembangunan di Kampung Wanggar Makmur Distrik Wanggar Kabupaten Nabire ?
3. Bagaimana upaya yang dapat diberikan Kepala Kampung dalam meningkatkan pembangunan di Kampung Wanggar Makmur Distrik Wanggar Kabupaten Nabire ?

LANDASAN TEORITIS

A. Peranan Kepala Kampung (Variabel Bebas = X)

Menurut Sarjono Soekanto (2003 : 243) peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidup. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam menjalankan suatu peranan.

Menurut pendapat Bayu Suriningrat (2001:64) Kepala Desa adalah penguasa tunggal didalam pemerintahan desa, bersama-sama dengan pembantunya dan ia merupakan pamong desa dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan rumah tangga desa, disamping itu dia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan.

Menurut para ahli teori mengatakan peranan kepala desa dalam pembangunan yaitu :

1. Perencanaan

Menurut Bintoro Tjokroaminoto (2004 : 90) mendefinisikan perencanaan sebagai proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu perencanaan adalah serangkaian proses penentuan tindakan masa depan yang disertai pertimbangan yang logis dan kontinu untuk memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin guna mencapai tujuan tertentu.

2. Pelaksanaan

Pengertian Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan yang dikemukakan oleh Abdullah (2001 : 5) bahwa pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan

ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

3. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah proses masyarakat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa harus mengurangi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan dari generasi yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan pemanfaatan lingkungan hidup dan kelestarian lingkungannya agar kualitas lingkungan tetap terjaga. Kelestarian lingkungan yang tidak terjaga, akan menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang, atau bahkan akan hilang menurut Syamsiah Badruddin (2001:47)

4. Pengembangan

Pengembangan pembangunan merupakan strategi memanfaatkan dan mengkombinasikan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan tantangan) yang ada sebagai potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi pembangunan akan barang dan jasa yang merupakan fungsi dari kebutuhan baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal ini berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya teknologi, sedangkan faktor eksternal dapat berupa peluang dan ancaman yang muncul seiring dengan interaksinya dengan wilayah lain.

Menurut Widjaja (2003:27) “Kepala Desa yaitu penguasa tertinggi di desa dan sebagai pemimpin formal maupun informal, pemimpin yang setiap waktu berada di tengah-tengah rakyat yang dipimpinnya. Kepala desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati / walikota, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Bamusdes, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

Menurut Widjaja (2003:28) Pertanggungjawaban Kepala Desa dilakukan Kepala Desa agar sendi tanggung jawab pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan Kepala Desa kepada rakyat melalui BPD dapat dilihat sebagai perwujudan dari kedaulatan rakyat (demokrasi) dan perwujudannya ditingkat desa.

Fungsi dari seorang pemimpin menurut Gerungan dalam Walgito (2003 : 106) yaitu sebagai berikut :

- 1) Seorang pemimpin bertugas memberikan struktur yang jelas dari situasi-situasi yang rumit yang dihadapi oleh kelompoknya (*structuring the situation*)
- 2) Seorang pemimpin bertugas mengawasi dan menyalurkan perilaku kelompok yang dipimpinnya (*controlling group behavior*). Ini juga berarti bahwa seorang pemimpin bertugas mengendalikan perilaku anggota kelompok dan kelompok itu sendiri.

- 3) Seorang pemimpin bertugas sebagai juru bicara kelompok yang dipimpinya. Seorang pemimpin harus dapat merasakan dan menerangkan kebutuhan-kebutuhan kelompok yang dipimpinya ke dunia luar, baik mengenai sikap kelompok, tujuan, harapan-harapan ataupun hal-hal yang lain.

Wewenang kepala desa menurut Undang – Undang Nomor .6 tahun 2014 pasal 26 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
- n. Mewakili Desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala desa mempunyai hak menurut Undang – Undang Nomor .6 tahun 2014 pasal 26 ayat (3) sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa
- c. Menerima penghasilan tetap bulan tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan
- d. Mendapat perlindungan hukum atau kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa

Kepala desa mempunyai kewajiban menurut Undang – Undang Nomor .6 tahun 2014 pasal 26 ayat (4) sebagai berikut:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
- e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender

B. Pembangunan Kampung (Variabel Terikat = Y)

Menurut Bintoro, (2000:59) mengatakan bahwa pembangunan itu adalah suatu proses dinamis sebagai usaha kearah tingkat kesejahteraan dan keadilan yang lebih baik. Menurut Diana, (2002 : 177) mengatakan bahwa komponen ini dalam pendekatan pembangunan masyarakat adalah penekanan pada penyatuan masyarakat sebagai suatu kesatuan

Menurut Anwar (2005:17), pembangunan dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang mencakup aspek-aspek pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan yang berdimensi lokasi dalam ruang dan berkaitan dengan aspek sosial ekonomi wilayah. Pengertian pembangunan dalam sejarah dan strateginya telah mengalami evolusi perubahan, mulai dari strategi pembangunan yang menekankan kepada pertumbuhan ekonomi, kemudian pertumbuhan dan kesempatan kerja, pertumbuhan dan pemerataan, penekanan kepada kebutuhan dasar, pertumbuhan dan lingkungan hidup, dan pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut Siagian (2008:21) memberikan pengertian tentang pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*), sedangkan Beratha (1991:36) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Affandi, 1996:49). Portes (dalam Affandi, 1996:50) mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Sama halnya dengan Portes, menurut Deddy T. Tikson (dalam Affandi 1996:50) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Sedangkan dalam pengertian ekonomi murni, pembangunan adalah

suatu usaha proses yang menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Bintoro, 1978:13), dengan demikian, proses pembangunan terjadi di semua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro. Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan/perbaikan (progress), pertumbuhan dan diversifikasi. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana (Trijono Lambang, 2007:73).

Pada dekade tujuh puluhan timbul perubahan pendekatan terhadap pembangunan. Siagian (2008:127), mendefinisikan pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam mempengaruhi masa depannya. Ada empat implikasi dari definisi tersebut, yaitu :

- a. Pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok.
- b. Pembangunan berarti mendorong timbulnya kebersamaan, pemerataan dan kesejahteraan.
- c. Pembangunan berarti mendorong dan menaruh kepercayaan untuk membimbing dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya kepercayaan ini dinyatakan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan memutuskan.
- d. Pembangunan berarti mengurangi ketergantungan Negara yang satu dengan Negara lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan dihormati

Perencanaan Pembangunan dapat dilihat perbedaannya dari segi jangka waktu rencana (Tjokrowinoto, 2007:75), yaitu :

- 1) Rencana Jangka Panjang. Perencanaan ini meliputi jangka waktu 10 tahun keatas.
- 2) Rencana Jangka Menengah. Perencanaan ini meliputi jangka waktu antara 3 sampai dengan 8 tahun.
- 3) Rencana Jangka Pendek. Perencanaan dengan jangka waktu setengah sampai dengan 2 tahun.

Menurut Suharto Edi (2006:126) dalam bukunya yang berjudul Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat, pengertian daerah berbeda– beda tergantung aspek ditinjaunya. Dari aspek ekonomi, daerah mempunyai tiga pengertian yaitu :

- a. Suatu daerah dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi di daerah dan didalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat–sifat yang sama. Kesamaan sifat–sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan perkapitanya, budayanya geografisnya, dan sebagainya. Daerah dalam pengertian seperti ini disebut daerah homogen.

- b. Suatu daerah dianggap sebagai suatu ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi yang disebut daerah modal.
- c. Suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, kecamatan dan sebagainya. Jadi daerah di sini didasarkan pada pembagian administrasi suatu Negara. Disebut sebagai daerah perencanaan atau daerah administrasi.

Menurut Soetomo (2008 : 27), pembangunan sebagai proses perubahan dapat dipahami dan dijelaskan dengan cara yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam hal sumber atau faktor yang mendorong perubahan tadi, misalnya yang ditempatkan dalam posisi lebih dominan, sumber perubahan internal atau eksternal. Disamping itu, sebagai proses perubahan juga dapat dilihat dari intensitas atau fundamental tidaknya perubahan yang diharapkan, melalui transformasi struktural ataukah tidak. Sebagai proses mobilisasi sumberdaya juga dapat dilihat pandangan dan penjelasan yang berbeda, misalnya pihak yang diberi kewenangan dalam pengelolaannya diantara tiga *stakeholders* pembangunan, yaitu negara, masyarakat, dan swasta. Perbedaan pandangan juga menyangkut level pengelolaan sumber daya tersebut, tingkat lokal, regional, atau nasional

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, dimana metode deskriptif merupakan suatu metode yang dapat menjawab permasalahan dalam penelitian berdasarkan objek penelitian yang diteliti dan selanjutnya hasil penelitian yang diperoleh akan diolah sesuai dengan konsep dan teori yang ada, Sugiono (2000 : 53)

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kampung Wanggar Makmur Distrik Wanggar Kabupaten Nabire

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah objek penelitian yang akan dicari kebenarannya, dalam hal ini populasi yaitu seluruh masyarakat di Kampung Wanggar Makmur sebanyak 1.789 orang

2. Sampel

Sampel adalah merupakan sebagian dari jumlah keseluruhan objek dari populasi yang akan diwakili untuk dipilih dalam penelitian menurut Hadari

Nawawi (1991 : 146). Berdasarkan pendapat para ahli di atas maka, teknik penarikan sampel yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Menurut Sugiono (1998 : 62) adalah teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja yaitu yang memahami tentang keadaan Kampung Wanggar Makmur Distrik Nabire Kabupaten Nabire. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagian dari jumlah populasi yaitu sebanyak 60 orang, yang terdiri dari :

1. Aparat kampung berjumlah	= 6 orang
2. Masyarakat (Setiap RT 3 Orang) (3 x 18)	= 54 orang
Jumlah	= 60 Orang

D. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1. Sumber Pengumpulan Data

Adapun sumber data dalam pengumpulan data terbagi atas dua sumber yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber informasi utama atau yang berhak memberikan data, melalui wawancara.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dan bersumber dari buku-buku, laporan-laporan, jurnal ataupun majalah-majalah dan sebagainya, yang sesuai dengan obyek penelitian.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini teknik yang penulis gunakan dalam menjangkau data adalah melalui pengamatan, wawancara dan angket / kuisioner yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. **Observasi (pengamatan)** adalah teknik pengumpulan data dimana penyelidik mengadakan pengamatan langsung pada obyek penelitian. Baik pengamatan yang dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi rekayasa.

b. **Interview (wawancara)** adalah salah satu cara yang digunakan penelitian untuk memperoleh informasi atau keterangan lisan melalui tatap muka dengan pernyataan langsung kepada responden.

c. **Kuesioner (daftar pertanyaan)** adalah sebagai suatu daftar pertanyaan untuk memperoleh data berupa jawaban dari pada responden.

E. Teknik Pengelolaan Data

Hasil pengukuran atau data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan tiga cara :

- a. Editing
Yaitu proses memeriksa kembali data yang telah dikumpulkan dari objek penelitian dan dipilih data yang valid atau akurat.
- b. Coding
Yaitu memberi kode atau tanda tertentu pada klasifikasi data yang terpilih untuk mempermudah analisa data.
- c. Tabulasi
Yaitu suatu proses untuk menghitung frekwensi data yang terbilang dari masing-masing kategori melalui tabulasi data yang diperoleh di lapangan, agar tampak ringkas dan untuk menghitung persentasenya dapat digunakan rumus :

$$P = \frac{f}{N} \times 100\% \text{ (Anto Dajan, 1973)}$$

Dimana :

- P : Persentase
- f : Jumlah jawaban responden
- N : Jumlah responden
- 100% : Nilai konstanta

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh diolah, penulis menggunakan teknik analisa kuantitatif yang dijabarkan dalam persentase ataupun hubungan korelasi untuk mengukur kedua variabel yang diteliti, kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat.

PEMBAHASAN

A. Peranan Kepala Kampung (Variabel Bebas)

Pada Variabel Bebas dalam hal ini Peranan Kepala Kampung, terdapat indikator yang mempengaruhi yaitu :

1. Sebagai Perencana

Tabel 1

Distribusi jawaban responden tentang Kepala Kampung memiliki Standar Operasional Prosedur dalam kegiatan pembangunan di wilayah kerjanya

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Memiliki	16	26,67
2	Kadang – kadang	24	40,00
3	Tidak memiliki	20	33.33
Jumlah		60	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada Tabel 1 mengenai Kepala Kampung memiliki Standar Operasional Prosedur dalam kegiatan pembangunan di wilayah kerjanya menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban **Kadang – kadang** dengan jumlah responden sebanyak 24 orang atau 40,00%, hal ini membuktikan bahwa tidak semua pekerjaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kampung memiliki Standar Operasional Prosedur tetapi aparat melakukannya dikarenakan adanya program kegiatan yang telah direncanakan dalam program kerja kampung

Tabel 2

Distribusi jawaban responden tentang pihak Kantor kampung memiliki rencana strategis kampung yang terencanakan dalam program kerja

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Memiliki	24	40,00
2	Kadang – kadang	17	28,33
3	Tidak memiliki	19	31,67
Jumlah		60	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada Tabel 2 mengenai pihak Kantor kampung memiliki rencana strategis kampung yang terencanakan dalam program kerja menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban **Memiliki** dengan jumlah responden sebanyak 24 orang atau 40,00%, hal ini membuktikan bahwa setiap kepala kampung tentunya harus memiliki Renstra (Rencana Strategi) dalam pengembangan kampung karena kepala kampung tentunya memiliki visi dan misi sehingga target dan realisasi dalam pencapaian pembangunan dapat terwujud

Tabel 3

Distribusi jawaban responden tentang proses pelaksanaan pembangunan di kampung sudah sesuai dengan yang direncanakan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sesuai	13	21,67
2	Kurang Sesuai	26	43,33
3	Tidak Sesuai	21	35,00
Jumlah		60	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada Tabel 3 mengenai proses pelaksanaan pembangunan di kampung sudah sesuai dengan yang direncanakan menunjukkan

bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban *Kurang Sesuai* dengan jumlah responden sebanyak 26 orang atau 43,33%, hal ini membuktikan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di kampung aparat kampung tentunya ingin memberikan yang terbaik buat kampung tetapi dikarenakan program kerja pemerintah kampung yang bukan berfokus terhadap pembangunan fisik dan selain itu kurangnya dana yang dimiliki sehingga membuat pelaksanaan pembangunan tentunya terkadang kurang sesuai tetapi pemerintah kampung akan selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik buat masyarakat di kampung

2. Sebagai Pelaksana

Tabel 4

Distribusi jawaban responden tentang kepala kampung melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokoknya

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sesuai	24	40,00
2	Kurang sesuai	24	40,00
3	Tidak sesuai	12	20,00
Jumlah		60	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada Tabel 4 mengenai kepala kampung melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas pokoknya menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban *Sesuai dan Kurang Sesuai* dengan jumlah responden sebanyak 24 orang atau 40,00%, hal ini membuktikan bahwa kepala Kampung sebagai pemimpin tentunya memahami aturan dan tugas pokoknya sehingga dalam pelaksanaan aktivitas sehari – hari tentunya kepala kampung mampu memberikan yang terbaik buat aparatnya dan masyarakatnya meskipun terkadang dalam pelaksanaan tugas pemimpin memiliki kepribadian yang kurang sejalan dengan bawahannya

Tabel 5

Distribusi jawaban responden tentang pelaksanaan pembangunan di Kampung sesuai dengan program kerja

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Sesuai	17	28,33
2	Kurang Sesuai	24	40,00
3	Tidak sesuai	19	31,67
Jumlah		60	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada Tabel 5 mengenai pelaksanaan pembangunan di Kampung sesuai dengan program kerja menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban *Kurang Sesuai* dengan jumlah responden sebanyak 24 orang atau 40,00%, hal ini membuktikan bahwa sebelum melakukan kegiatan rutinitas di kampung tentunya kampung memiliki program rencana prioritas yang terkadang menjadi sesuatu yang diutamakan namun ketika pimpinan dan aparat kampung melakukan musyawarah pengembangan pembangunan kampung (Musrebangkam) usulan – usulan yang diajukan tidak dapat disetujui sehingga tentunya pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan

Tabel 6

Distribusi jawaban responden tentang kepala kampung selalu mendukung pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	10	16,67
2	Kadang – kadang	26	43,33
3	Tidak pernah	24	40,00
Jumlah		60	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada Tabel 6 mengenai kepala kampung selalu mendukung pelaksanaan program kegiatan pembangunan yang diusulkan oleh masyarakat menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban *Kadang – kadang* dengan jumlah responden sebanyak 26 orang atau 43,33%, hal ini membuktikan bahwa dalam menyusun program Rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah dan Panjang tingkat kampung tentunya pihak pemerintah kampung dan juga masyarakat dalam hal ini diwakilkan oleh tokoh – tokoh masyarakat dan tua – tua kampung untuk dapat duduk bersama menyusun kegiatan – kegiatan yang hendak diusulkan untuk pengembangan pembangunan kampung

3. Sebagai Pengembang

Tabel 7

Distribusi jawaban responden tentang kepala Kampung mampu mengembangkan potensi yang ada di kampung

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Mampu	18	30,00
2	Kurang mampu	22	36,67
3	Tidak mampu	20	33,33
Jumlah		60	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada Tabel 7 mengenai kepala Kampung mampu mengembangkan potensi yang ada di kampung menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban *Kurang mampu* dengan jumlah responden sebanyak 22 orang atau 36,67%, hal ini membuktikan bahwa untuk mengembangkan kampung tentunya peran dari aparat Kampung selaku pihak yang dipercaya untuk menangani pemerintahan kampung tentunya selaku kepala Kampung dapat melihat potensi, akan tetapi hal ini terbentur dengan sarana dan fasilitas yang ada sehingga potensi yang ada belum maksimal untuk dapat dikelola dengan baik

Tabel 8

Distribusi jawaban responden tentang kepala kampung yang sekarang mampu melakukan perubahan dalam pengembangan kampung

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Mampu	23	38,33
2	Kurang Mampu	18	30,00
3	Tidak Mampu	19	31,67
Jumlah		60	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada Tabel 8 mengenai kepala kampung yang sekarang mampu melakukan perubahan dalam pengembangan kampung menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban *Mampu* dengan jumlah responden sebanyak 23 orang atau 38,33%, hal ini membuktikan bahwa sebagai pemimpin tentunya harapan masyarakat adalah dapat merubah paradigma yang menjadi suatu hal yang diinginkan masyarakat yang mana kepala kampung menata dan bersama – sama dengan masyarakat untuk membangun daerahnya

Tabel 9

Distribusi jawaban responden tentang pengembangan kampung yang dilakukan oleh kepala kampung selalu mendapatkan dukungan dari masyarakat

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	23	38,33
2	Kadang – kadang	16	16,67
3	Tidak pernah	21	35,00
Jumlah		60	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada Tabel 9 mengenai pengembangan kampung yang dilakukan oleh kepala kampung selalu mendapatkan dukungan dari masyarakat menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban **Selalu** dengan jumlah responden sebanyak 23 orang atau 38,33%, hal ini membuktikan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan kampung tentunya aparat pemerintah kampung sangat membutuhkan dukungan dari masyarakat karena tanpa dukungan dan partisipasi maka pelaksanaan pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar

B. Pembangunan Kampung (Variabel Terikat)

Pada Variabel Terikat dalam hal ini Pembangunan Kampung, terdapat indikator yang mempengaruhi yaitu :

1. Pembangunan Fisik

Tabel 10

Distribusi jawaban responden tentang pembangunan fisik yang terdapat di kampung selalu menjadi prioritas dalam program kerja kampung

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	16	26,67
2	Kadang – kadang	24	40,00
3	Tidak Pernah	20	33,33
Jumlah		60	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada Tabel 10 mengenai pembangunan fisik yang terdapat di kampung selalu menjadi prioritas dalam program kerja kampung menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban **Kadang – kadang** dengan jumlah responden sebanyak 24 orang atau 40,00%, hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah kampung untuk pembangunan fisik merupakan upaya pihak pemerintah kampung melalui program perencanaan yang diusulkan ke pemerintah Distrik ataupun pemerintah Kabupaten

Tabel 11

Distribusi jawaban responden tentang bangunan – bangunan fisik yang terdapat di kampung selalu dirawat dan difungsikan

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	13	21,67
2	Kadang – kadang	26	43,33
3	Tidak pernah	21	35,00
Jumlah		60	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada Tabel 11 mengenai bangunan – bangunan fisik yang terdapat di kampung selalu dirawat dan difungsikan menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban **Kadang – kadang** dengan jumlah responden sebanyak 26 orang atau 43,33%, hal ini membuktikan bahwa bangunan – bangunan yang terdapat di kampung tentunya difungsikan oleh masyarakat kampung sesuai dengan peruntukannya namun yang menjadi kendala dimana bangunan – bangunan tersebut kurang mendapatkan perhatian baik aparat kampung maupun masyarakat, seperti kondisi bangunan yang kurang dirawat sehingga ada beberapa bangunan di Kampung memiliki kerusakan baik kerusakan ringan, sedang dan berat

Tabel 12

Distribusi jawaban responden tentang pihak pemerintah kampung selalu memiliki dana untuk kegiatan pembangunan fisik yang ada di Kampung

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	16	26,66
2	Kadang – kadang	22	36,67
3	Tidak pernah	22	36,67
Jumlah		60	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada Tabel 12 mengenai pihak pemerintah kampung selalu memiliki dana untuk kegiatan pembangunan fisik yang ada di Kampung menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban **Kadang – kadang** dengan jumlah responden sebanyak 22 orang atau 36,67%, hal ini membuktikan bahwa dana yang pemerintah kampung diperoleh dari dana Program strategis Pengembangan Kampung (Prospek) atau Dana kampung yang merupakan program Presiden Jokowi untuk pemerataan pembangunan sehingga tentunya pihak Pemerintah kampung tidak sellau memiliki dana untuk perbaikan bangunan dan fasilitas lainnya, karena dana yang pemerintah Kampung miliki tentunya berasal dari Rencana Kegiatan Anggaran yang dijadikan sebagai pencapaian tercapainya tujuan pembangunan nasoinal

2. Pembangunan Non Fisik

Tabel 13

Distribusi jawaban responden tentang pihak pemerintah kampung selalu memberikan pelatihan dan penyuluhan dalam kegiatan di kampung

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	15	25,00
2	Kadang – kadang	25	41,67
3	Tidak Pernah	20	33,33
Jumlah		60	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada Tabel 13 mengenai pihak pemerintah kampung selalu memberikan pelatihan dan penyuluhan dalam kegiatan di kampung menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban **Kadang – kadang** dengan jumlah responden sebanyak 25 orang atau 41,67%, hal ini membuktikan bahwa masyarakat sangat terkadang membutuhkan adanya pelatihan – pelatihan yang bergerak dalam dunia usaha tetapi tentunya pelatihan tersebut membutuhkan biaya untuk praktek sehingga terkadang pemerintah kampung jarang melakukan pelatihan untuk masyarakat di wilayah kerjanya

Tabel 14

Distribusi jawaban responden tentang pemerintah kampung selalu memberikan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	16	26,67
2	Kadang – kadang	23	38,33
3	Tidak pernah	21	35,00
Jumlah		60	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada Tabel 14 mengenai pemerintah kampung selalu memberikan pelatihan kewirausahaan kepada masyarakat menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban **Kadang – kadang** dengan jumlah responden sebanyak 23 orang atau 38,33%, hal ini membuktikan bahwa bentuk usaha yang melekat pada masyarakat adalah di bidang kewirausahaan sehingga masyarakat terkadang menginginkan peranan pemerintah kampung untuk dapat melakukan kegiatan kewirausahaan bagi masyarakat namun yang terbentur yaitu terkadang tidak adanya dana yang dapat digunakan untuk pelatihan kewirausahaan tetapi aparat kampung akan memfasilitasi warganya

ketika ada kegiatan kewirausahaan yang dilakukan di tingkat Distrik atau Tingkat Kabupaten

Tabel 15
Distribusi jawaban responden tentang masyarakat selalu mendapatkan pembinaan – pembinaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya

No	Kategori Jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	15	25,00
2	Kadang – kadang	26	43,33
3	Tidak pernah	19	31,67
Jumlah		60	100,00

Sumber Data : Hasil Olahan Data Primer, 2018

Dari hasil penyajian data diatas pada tabel 4.15 mengenai masyarakat selalu mendapatkan pembinaan – pembinaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya menunjukkan bahwa responden lebih memilih pada kategori jawaban **Kadang - kadang** dengan jumlah responden sebanyak 26 orang atau 43,33%, hal ini membuktikan bahwa untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kampung tentunya pemerintah kampung akan berupaya semaksimal mungkin untuk dapat melibatkan warganya untuk dapat dibina dan dilatih, pembinaan ini tentunya terkadang menemui kendala dimana terdapat masyarakat yang memiliki kemampuan yang rendah dalam pemahaman sehingga aparat kampung agak susah dan lamban ketika memberikan pelatihan namun ini dikarenakan sifatnya pembinaan maka aparat harus sabar untuk membina dan melatihnya

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perencanaan kegiatan oleh pihak pemerintah kampung masih belum maksimal karena penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan harus benar – benar terencana sesuai kebutuhan warganya
2. Pihak pemerintah kampung merupakan pihak yang dipercayakan oleh oleh masyarakat sehingga untuk kegiatan pembangunan sistem perencanaan harus mampu memiliki prosedur standar operasional yang harus dipatuhi
3. Kurangnya kepekaan aparat kampung dalam melihatnya potensi – potensi yang ada agar dapat dikembangkan untuk meningkatkan taraf hidup warganya
4. Masih kurangnya perhatian masyarakat dan juga pihak kampung dalam menjaga dan merawat bangunan – bangunan dan juga fasilitas umum yang dimiliki kampung

5. Minimnya pelatihan – pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kampung seperti pelatihan dan pembinaan di bidang kewirausahaan yang dapat membantu masyarakat dalam menunjang kesejahteraannya

B. Saran

1. Pihak aparat kampung perlu membuat Rencana Strategis (Renstra) pengembangan kampung agar memiliki masterplan dalam tata kelola pemerintahan kampung
2. Pihak aparat kampung perlu memberikan motivasi agar warga masyarakat dapat berpartisipasi dalam menunjang kegiatan – kegiatan di kampung
3. Pihak aparat kampung perlu memberikan pembinaan dan pelatihan yang telah diprogramkan untuk menunjang kesejahteraan warganya
4. Melibatkan masyarakat dan aparat dalam menyusun dan membuat program – program kerja di kampung
5. Menindak tegas ke setiap orang yang tentunya dengan sengaja atau tidak sengaja dalam merusak fasilitas – fasilitas umum atau bangunan – bangunan di kampung
6. Menanamkan kesadaran dan kecintaan kepada seluruh warganya untuk hidup rukun dan harmonis dalam kehidupan bermasyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, *Jalan Menuju Stabilitas. Mencapai Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan*, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2003
- Anto Dajan, *Metode Penelitian Survey*, Balai Pustaka, Jakarta, 1973
- Anwar, *Konsep Pembangunan Desa*, Gramedia, Jakarta, 2005
- Bayu Suriningrat, *Pemerintah Dan Administrasi*, PT. Mekar Djaya, Bandung, 2001
- Beratha, I Nyoman, *Pembangunan Desa Berwawasan Lingkungan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991
- Bintoro, Tjokroamidjojo, *Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta, 2004
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University, Jakarta 2001
- Sarjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006
- Siagian, Sondang P, *Adminitrasi Pembangunan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2008
- Soetomo, *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008
- Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi Cetakan ke-16*. Bandung, Alfabeta, 2005
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2008
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat memberdayakan Rakyat*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006
- Syamsiah Badruddin, *Dampak Globalisasi Terhadap Pembangunan Di Desa Berkembang* (Jurnal Edukasi, Bandung, 2006
- Tjokrowinoto, Moejiarto, *Pembangunan Dilema dan Tantangan*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 2007

Trijono, Lambang, *Pembangunan dan Perdamaian*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007

Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Walgito, Bimo, *Psikologi Sosial Suatu Pengantar*, Andi, Yogyakarta, 2003.

Widjaja, HAW, *Otonomi Desa*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2003